

POLITIK PEMBANGUNAN INDONESIA:

ANTARA AMBISI PERTUMBUHAN DAN KUALITAS TATA KELOLA

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Pertumbuhan ekonomi tinggi adalah tujuan, tetapi kualitas tata kelola menentukan apakah pertumbuhan itu inklusif, berkelanjutan, dan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.



TUJUAN BESAR INDONESIA

Indonesia Emas 2045:

Negara maju, berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan.

TARGET UTAMA PEMBANGUNAN



Pertumbuhan Ekonomi
Nennu 8%



Pendapatan Per Kapita
Setara Negara Maju



Industri Pengolahan
Kontribusi 28% pada 2045



SDM Unggul,
Inovatif & Produktif



Pembangunan
Berkelanjutan & Hijau



Tata Kelola
Bersih, Akuntabel
& Berkeadilan

1. KONDISI TERKINI EKONOMI INDONESIA



PERTUMBUHAN
EKONOMI 2025
5,11%
(y-on-y)



TRIULAN I-2026
5,61%
(y-on-y)



INFLASI APRIL 2026
1,95%
(y-on-y)



BI RATE MEI 2026
5,25%

Ekonomi tumbuh stabil, namun tantangan struktural, global, dan kualitas tata kelola masih menjadi pekerjaan besar.

Sumber: BPS (Mei 2026), Bank Indonesia (Mei 2026)

2. MENGAPA TATA KELOLA MENENTUKAN PERTUMBUHAN?



Institusi yang kuat menurunkan biaya ekonomi dan meningkatkan kepercayaan.



Kebijakan yang konsisten dan regulasi yang jelas mendorong investasi produktif.



Transparansi & akuntabilitas memastikan hasil pembangunan dirasa masyarakat.



Keadilan & penegakan hukum menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.



Partisipasi publik memperkuat legitimasi dan kualitas keputusan pembangunan.

3. MESIN PERTUMBUHAN 8%



Investasi Produktif

Infrastruktur, industri, teknologi, dan energi.

*Rudy C Tarumingkeng: Politik Pembangunan Indonesia: Antara Ambisi
Pertumbuhan dan Kualitas Tata Kelola*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

6 Juni 2026

*Sebagai pijakan konteks, BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh **5,11%**, sedangkan triwulan I-2026 tumbuh **5,61% yoy**. RPJPN 2025–2045 menargetkan pendapatan per kapita Indonesia setara negara maju dan kontribusi industri pengolahan sebesar 28% pada 2045. Pemerintah juga menempatkan pertumbuhan menuju 8% pada 2029 sebagai bagian dari sasaran RPJMN 2025–2029. Namun, indikator tata kelola menunjukkan tantangan: WGI mengukur enam dimensi governance seperti government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption; sementara CPI Transparency International menempatkan Indonesia pada skor **34** dalam profil negaranya, serta laporan Reuters menyebut penurunan peringkat Indonesia dalam CPI 2025 terkait pelemahan pengawasan dan isu korupsi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))*

POLITIK PEMBANGUNAN INDONESIA: ANTARA AMBISI PERTUMBUHAN DAN KUALITAS TATA KELOLA

Abstrak

Politik pembangunan Indonesia memasuki fase penting ketika ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi kembali menjadi agenda utama negara. Target pertumbuhan menuju 8 persen, visi Indonesia Emas 2045, industrialisasi berbasis hilirisasi, transformasi digital, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia menjadi narasi besar pembangunan nasional. Namun, sejarah pembangunan menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, luasnya pasar domestik, atau melimpahnya sumber daya alam, melainkan juga oleh kualitas tata kelola. Artikel ini membahas hubungan antara ambisi pertumbuhan dan kualitas tata kelola dalam politik pembangunan Indonesia. Dengan pendekatan ekonomi politik, artikel ini menempatkan pembangunan sebagai arena interaksi antara negara, pasar, masyarakat, institusi, kekuasaan, kepentingan, dan distribusi manfaat. Pertumbuhan ekonomi tinggi dapat menjadi instrumen transformasi nasional apabila didukung oleh institusi yang kredibel, birokrasi efektif, hukum yang pasti, transparansi anggaran, pengendalian korupsi, partisipasi publik, dan evaluasi kebijakan berbasis data. Sebaliknya, ambisi pertumbuhan dapat berubah menjadi sumber risiko bila dikejar melalui proyek besar yang tidak produktif, perluasan kewenangan negara tanpa akuntabilitas, pelemahan lembaga independen, relaksasi standar lingkungan, serta kebijakan yang lebih mengutamakan legitimasi politik jangka pendek daripada produktivitas jangka panjang. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembangunan Indonesia harus bergerak dari paradigma “growth first” menuju “quality growth with good governance”. Pertumbuhan tinggi tetap diperlukan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menuju Indonesia Emas 2045, tetapi pertumbuhan itu harus inklusif, produktif, hijau, dan dikelola melalui tata kelola yang bersih, adaptif, serta demokratis.

Kata Kunci

Politik pembangunan; tata kelola; pertumbuhan ekonomi; Indonesia Emas 2045; ekonomi politik; good governance; korupsi; birokrasi; desentralisasi; pembangunan inklusif; industrialisasi; kebijakan publik.

1. Pendahuluan

Pembangunan selalu menjadi inti dari proyek kebangsaan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pembangunan dipahami bukan hanya sebagai peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga sebagai usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, memperkuat kedaulatan negara, mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan menegakkan martabat bangsa di tengah pergaulan dunia. Dalam perjalanan sejarah, orientasi pembangunan Indonesia mengalami perubahan: dari pembangunan nasional pascakolonial, pembangunan stabilitas dan pertumbuhan pada Orde Baru, reformasi politik dan desentralisasi setelah 1998, hingga agenda transformasi struktural dan Indonesia Emas 2045 pada masa kini.

Pada era kontemporer, narasi pembangunan Indonesia semakin kuat dikaitkan dengan ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, memperkuat investasi, membangun infrastruktur, mendorong industrialisasi, mempercepat transformasi digital, serta memperluas program-program sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Target ini muncul dari kesadaran bahwa pertumbuhan sekitar 5 persen, meskipun stabil, mungkin belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Namun, pertumbuhan tinggi bukan sekadar persoalan angka. Pertumbuhan adalah hasil dari kebijakan, institusi, insentif, struktur ekonomi, kapasitas negara, dan kepercayaan masyarakat. Negara dapat memiliki target pertumbuhan tinggi, tetapi target itu hanya akan menjadi slogan bila tata kelola lemah. Banyak negara kaya sumber daya gagal menjadi negara maju karena korupsi, patronase politik, birokrasi tidak efektif, ketidakpastian hukum, regulasi tidak konsisten, dan lemahnya akuntabilitas. Sebaliknya, negara yang tidak selalu kaya sumber daya dapat tumbuh cepat karena memiliki institusi efektif, kebijakan konsisten, birokrasi profesional, dan tata kelola publik yang kredibel.

Inilah alasan mengapa politik pembangunan Indonesia perlu dibahas melalui dua kata kunci: **ambisi pertumbuhan** dan **kualitas tata kelola**. Ambisi pertumbuhan diperlukan karena Indonesia menghadapi tantangan besar: middle-income trap, bonus demografi yang terbatas waktunya, ketimpangan wilayah, kebutuhan lapangan kerja berkualitas, perubahan iklim, transisi energi, dan persaingan geopolitik global. Namun, kualitas tata kelola diperlukan agar ambisi tersebut tidak berubah menjadi pemborosan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, pelemahan demokrasi, dan krisis kepercayaan publik.

Artikel ini bertujuan membahas politik pembangunan Indonesia dalam hubungan antara target pertumbuhan dan tata kelola. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana Indonesia dapat mengejar pertumbuhan tinggi tanpa mengorbankan kualitas institusi, akuntabilitas publik, keberlanjutan fiskal, dan keadilan sosial? Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, artikel ini melihat pembangunan sebagai proses yang selalu melibatkan kepentingan, kekuasaan, distribusi sumber daya, dan kualitas lembaga.

2. Politik Pembangunan: Konsep dan Kerangka Analisis

Politik pembangunan adalah kajian mengenai bagaimana keputusan pembangunan dibuat, oleh siapa, untuk kepentingan siapa, dengan mekanisme apa, dan menghasilkan dampak apa bagi masyarakat. Dalam pengertian ini, pembangunan tidak pernah netral. Setiap proyek pembangunan, kebijakan fiskal, investasi infrastruktur, subsidi, hilirisasi, reformasi birokrasi, atau program sosial selalu melibatkan pilihan politik. Pilihan tersebut menentukan sektor mana yang diutamakan, daerah mana yang diprioritaskan, kelompok mana yang memperoleh manfaat, dan kelompok mana yang menanggung biaya.

Dalam ekonomi pembangunan klasik, pertumbuhan ekonomi sering dipahami sebagai hasil akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Solow menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang bergantung pada kemajuan teknologi dan produktivitas. Romer kemudian memperkuat gagasan bahwa pengetahuan, inovasi, dan modal manusia merupakan sumber pertumbuhan endogen. Namun, teori pertumbuhan modern juga semakin menekankan bahwa produktivitas tidak tumbuh dalam ruang kosong. Produktivitas membutuhkan institusi yang mendukung: hukum yang pasti, hak milik yang terlindungi, kontrak yang dapat ditegakkan, birokrasi yang efisien, dan kebijakan yang kredibel.

North menegaskan bahwa institusi adalah "rules of the game" yang membentuk perilaku ekonomi. Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa negara berkembang atau gagal bukan hanya karena geografi atau budaya, tetapi karena institusi politik dan ekonomi yang inklusif atau ekstraktif. Rodrik menekankan bahwa strategi pembangunan perlu disesuaikan dengan konteks institusional masing-masing negara. Dengan demikian, kualitas tata kelola menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertumbuhan.

Dalam konteks Indonesia, politik pembangunan harus dibaca melalui beberapa dimensi. Pertama, dimensi negara: seberapa besar kapasitas negara dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Kedua, dimensi pasar: bagaimana negara menciptakan iklim investasi dan kompetisi sehat. Ketiga, dimensi masyarakat: bagaimana publik berpartisipasi dan mengawasi pembangunan. Keempat, dimensi institusi: bagaimana hukum, birokrasi, lembaga pengawas, dan mekanisme akuntabilitas bekerja. Kelima, dimensi distribusi: bagaimana hasil pembangunan dibagikan antarwilayah, antarkelas sosial, dan antargenerasi.

Dengan kerangka ini, ambisi pertumbuhan tinggi tidak dapat hanya dijawab dengan daftar proyek. Pertumbuhan tinggi membutuhkan tata kelola yang mampu memastikan bahwa proyek benar-benar produktif, belanja publik efisien, korupsi ditekan, regulasi konsisten, investasi berkualitas, lingkungan dijaga, dan masyarakat memperoleh manfaat.

3. Ambisi Pertumbuhan dalam Agenda Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 menjadi narasi besar pembangunan nasional. Visi ini menempatkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada usia 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan, mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan, memperkuat industri pengolahan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Ambisi pertumbuhan tinggi lahir dari kebutuhan objektif. Pertumbuhan sekitar 5 persen relatif baik untuk menjaga stabilitas, tetapi belum tentu cukup untuk mempercepat konvergensi menuju negara maju. Bila Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah, pertumbuhan harus lebih tinggi dan lebih produktif. Negara yang berhasil naik kelas biasanya mampu mengubah struktur ekonomi dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor bernilai tambah tinggi.

Namun, ambisi pertumbuhan harus dibedakan dari pertumbuhan semu. Pertumbuhan semu terjadi ketika PDB meningkat karena konsumsi jangka pendek, boom komoditas, belanja pemerintah yang tidak produktif, atau kredit yang tidak sehat. Pertumbuhan semu dapat memberi kesan kemajuan, tetapi tidak memperkuat produktivitas nasional. Sebaliknya, pertumbuhan berkualitas terjadi ketika ekonomi menghasilkan pekerjaan layak, teknologi meningkat, ekspor bernilai tambah naik, industri tumbuh, sumber daya manusia membaik, dan ketimpangan menurun.

Agenda Indonesia Emas 2045 menuntut transformasi struktural. Indonesia tidak cukup hanya mengekspor bahan mentah. Indonesia harus membangun industri berbasis teknologi. Indonesia tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik. Indonesia harus membangun kapasitas manusia dan institusi. Indonesia tidak cukup hanya menarik investasi. Indonesia harus memastikan investasi tersebut menciptakan transfer teknologi, keterkaitan lokal, dan lapangan kerja berkualitas.

Di sinilah tata kelola menjadi penentu. Tanpa tata kelola yang baik, ambisi Indonesia Emas dapat terjebak dalam proyek mercusuar, belanja besar, dan pencitraan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, ambisi tersebut dapat menjadi agenda transformasi nasional yang kredibel.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Legitimasi Politik

Dalam politik modern, pertumbuhan ekonomi sering menjadi sumber legitimasi pemerintahan. Pemerintah yang mampu menciptakan pertumbuhan, lapangan kerja, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan cenderung memperoleh dukungan publik. Sebaliknya, stagnasi ekonomi, pengangguran, inflasi, dan ketimpangan dapat melemahkan legitimasi.

Indonesia memiliki pengalaman panjang mengenai hubungan antara pertumbuhan dan legitimasi. Pada masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas menjadi dasar legitimasi politik. Pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, dan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menunjukkan keberhasilan negara. Namun, lemahnya demokrasi, korupsi, sentralisasi kekuasaan, dan ketimpangan akhirnya menimbulkan krisis legitimasi ketika krisis ekonomi 1997–1998 mengguncang fondasi rezim.

Pelajaran penting dari pengalaman tersebut adalah bahwa pertumbuhan tanpa akuntabilitas dapat rapuh. Selama ekonomi tumbuh, kelemahan tata kelola mungkin tidak terlihat. Namun, ketika krisis datang, kelemahan institusi muncul ke permukaan. Korupsi, kolusi, nepotisme, lemahnya pengawasan, dan ketergantungan pada modal jangka pendek memperparah krisis.

Pada masa reformasi, legitimasi pembangunan tidak bisa lagi hanya dibangun melalui pertumbuhan. Publik menuntut transparansi, partisipasi, keadilan, kebebasan sipil, dan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, politik pembangunan Indonesia masa kini harus menggabungkan pertumbuhan dengan demokrasi dan tata kelola.

Namun, terdapat ketegangan. Di satu sisi, proses demokrasi dapat memperlambat keputusan karena membutuhkan konsultasi, pengawasan, dan negosiasi. Di sisi lain, demokrasi memberi legitimasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan Indonesia bukan memilih antara demokrasi dan pembangunan, melainkan membangun demokrasi yang mampu menghasilkan kebijakan pembangunan efektif.

5. Tata Kelola sebagai Infrastruktur Tak Terlihat

Sering kali pembangunan dipahami sebagai pembangunan fisik: jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, smelter, gedung sekolah, rumah sakit, dan ibu kota baru. Semua itu penting. Namun, ada infrastruktur lain yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan: tata kelola.

Tata kelola adalah cara kekuasaan publik digunakan untuk mengelola sumber daya negara. Tata kelola mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, pengendalian korupsi, partisipasi publik, dan kapasitas birokrasi. Tanpa tata kelola yang baik, infrastruktur fisik dapat menjadi mahal, tidak efisien, tidak tepat guna, atau bahkan menjadi sumber korupsi.

Tata kelola yang baik menurunkan biaya transaksi. Investor lebih percaya bila regulasi konsisten dan hukum dapat ditegakkan. Masyarakat lebih patuh membayar pajak bila percaya uang publik dikelola baik. Birokrasi lebih efektif bila sistem merit berjalan. Program sosial lebih tepat sasaran bila data akurat. Infrastruktur lebih bermanfaat bila perencanaan berbasis kebutuhan nyata.

Sebaliknya, tata kelola buruk menaikkan biaya pembangunan. Korupsi meningkatkan biaya proyek. Regulasi tumpang tindih memperlambat investasi. Nepotisme menurunkan kualitas pejabat. Data buruk membuat bantuan salah sasaran. Lemahnya pengawasan menyebabkan proyek tidak selesai atau tidak dimanfaatkan. Ketidakpastian hukum menurunkan investasi jangka panjang.

Dalam pengertian ini, tata kelola adalah “infrastruktur tak terlihat” dari pembangunan. Negara dapat membangun jalan dan pelabuhan, tetapi bila institusi lemah, manfaat ekonomi tidak maksimal. Negara dapat menarik investasi besar, tetapi bila tata kelola buruk, investasi tersebut dapat menciptakan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan.

6. Birokrasi: Mesin atau Hambatan Pembangunan?

Birokrasi adalah mesin pelaksana pembangunan. Kebijakan yang baik akan gagal bila birokrasi tidak mampu melaksanakannya. Dalam negara modern, birokrasi mengelola anggaran, pelayanan publik, perizinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pajak, data, dan pengawasan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi merupakan salah satu syarat utama pembangunan berkualitas.

Indonesia telah melakukan berbagai reformasi birokrasi, termasuk digitalisasi layanan, penyederhanaan perizinan, sistem merit, evaluasi kinerja, dan pelayanan terpadu. Namun, tantangan masih besar. Banyak masyarakat dan pelaku usaha masih menghadapi prosedur panjang, koordinasi antarinstansi yang lemah, regulasi yang sering berubah, dan kualitas pelayanan yang tidak merata antardaerah.

Birokrasi dapat menjadi mesin pembangunan bila memiliki tiga kualitas. Pertama, kompetensi teknis. Pejabat publik harus memahami kebijakan, data, perencanaan, anggaran, dan evaluasi. Kedua, integritas. Tanpa integritas, kewenangan publik mudah berubah menjadi sumber rente. Ketiga, orientasi pelayanan. Birokrasi harus melayani masyarakat dan pelaku ekonomi, bukan memperumit urusan mereka.

Masalah birokrasi juga berkaitan dengan politik. Ketika jabatan publik terlalu dipengaruhi patronase politik, kualitas birokrasi menurun. Ketika promosi tidak berbasis merit, pejabat yang kompeten dapat tersingkir. Ketika birokrasi takut mengambil keputusan karena risiko hukum, kebijakan

menjadi lambat. Ketika birokrasi terlalu dekat dengan kepentingan bisnis tertentu, regulasi menjadi bias.

Reformasi birokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai digitalisasi. Digitalisasi penting, tetapi digitalisasi prosedur buruk hanya akan menghasilkan birokrasi digital yang tetap rumit. Yang dibutuhkan adalah penyederhanaan proses, perbaikan data, peningkatan kompetensi, penguatan integritas, dan perubahan budaya kerja.

7. Korupsi, Rente, dan Biaya Tersembunyi Pembangunan

Korupsi adalah salah satu hambatan terbesar pembangunan. Korupsi bukan hanya tindakan moral yang salah; korupsi juga memiliki biaya ekonomi besar. Korupsi meningkatkan biaya proyek, menurunkan kualitas barang publik, menghambat investasi, melemahkan kepercayaan publik, memperbesar ketimpangan, dan mengurangi efektivitas anggaran.

Dalam politik pembangunan, korupsi sering muncul karena adanya rente. Rente adalah keuntungan yang diperoleh bukan karena produktivitas, inovasi, atau efisiensi, tetapi karena akses terhadap kekuasaan, izin, konsesi, subsidi, proyek, atau regulasi. Ketika rente menjadi sumber keuntungan utama, pelaku ekonomi lebih tertarik mendekati kekuasaan daripada meningkatkan produktivitas. Ini berbahaya bagi pembangunan.

Indonesia memiliki risiko rente dalam banyak sektor: perizinan tambang, pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, tata niaga pangan, subsidi energi, alokasi lahan, dan proyek strategis. Semakin besar anggaran dan semakin luas kewenangan negara, semakin besar pula kebutuhan pengawasan. Negara yang aktif dalam pembangunan harus disertai negara yang akuntabel.

Korupsi juga merusak legitimasi. Masyarakat sulit percaya pada program pembangunan bila melihat korupsi terjadi. Investor jangka panjang ragu masuk bila harus menghadapi biaya informal. Aparatur yang jujur

kehilangan motivasi bila sistem tidak adil. Dalam jangka panjang, korupsi melemahkan modal sosial bangsa.

Pengendalian korupsi membutuhkan lebih dari penindakan. Penindakan penting, tetapi pencegahan lebih mendasar. Pencegahan mencakup transparansi anggaran, e-procurement, audit independen, perlindungan whistleblower, keterbukaan data, reformasi perizinan, pembatasan konflik kepentingan, penguatan KPK dan lembaga pengawas, serta peran media dan masyarakat sipil.

8. Desentralisasi: Pemerataan atau Fragmentasi Tata Kelola?

Desentralisasi adalah salah satu hasil penting reformasi. Dengan desentralisasi, daerah memperoleh kewenangan lebih besar untuk mengatur pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Secara teoritis, desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas kebijakan karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Desentralisasi juga dapat mendorong inovasi daerah dan mempercepat pelayanan publik.

Namun, desentralisasi juga menimbulkan tantangan tata kelola. Kualitas pemerintah daerah sangat beragam. Ada daerah yang inovatif dan efektif, tetapi ada pula daerah yang lemah dalam perencanaan, penganggaran, pelayanan, dan pengawasan. Ketimpangan kapasitas daerah membuat kualitas layanan publik tidak merata. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perizinan dapat berbeda jauh antarwilayah.

Desentralisasi juga dapat menciptakan fragmentasi regulasi. Investor sering menghadapi perbedaan aturan pusat dan daerah. Pemerintah daerah kadang membuat pungutan atau prosedur tambahan. Konflik kewenangan antara pusat dan daerah dapat memperlambat proyek pembangunan. Dalam sektor sumber daya alam, desentralisasi juga dapat memperbesar risiko perizinan yang tidak terkendali bila pengawasan lemah.

Namun, solusi bukan kembali sepenuhnya pada sentralisasi. Indonesia terlalu besar dan beragam untuk dikelola secara sangat terpusat. Yang dibutuhkan adalah desentralisasi yang berkualitas. Pemerintah pusat harus menetapkan standar nasional, menyediakan dukungan kapasitas, memperbaiki sistem data, dan melakukan evaluasi. Pemerintah daerah harus diberi ruang inovasi, tetapi juga harus akuntabel.

Desentralisasi yang baik dapat menjadi kekuatan pembangunan. Daerah dapat mengembangkan keunggulan lokal: agroindustri, pariwisata, ekonomi maritim, energi terbarukan, industri kreatif, dan jasa pendidikan. Untuk itu, kapasitas kepala daerah, birokrasi lokal, DPRD, perguruan tinggi daerah, dan masyarakat sipil harus diperkuat.

9. Investasi, Perizinan, dan Kepastian Hukum

Pertumbuhan tinggi membutuhkan investasi. Namun, investasi membutuhkan kepastian. Investor menilai bukan hanya potensi pasar, tetapi juga risiko regulasi, hukum, pajak, tenaga kerja, infrastruktur, dan stabilitas politik. Negara dengan pasar besar tetapi regulasi tidak konsisten dapat kalah dari negara yang pasarnya lebih kecil tetapi lebih pasti.

Indonesia telah berupaya memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, Online Single Submission, reformasi regulasi, dan kebijakan industrialisasi. Namun, tantangan tetap ada. Pelaku usaha masih sering mengeluhkan perubahan aturan, koordinasi pusat-daerah, proses lahan, ketidakpastian pajak, dan penegakan hukum.

Dalam politik pembangunan, investasi dapat menjadi sumber pertumbuhan tetapi juga sumber konflik. Investasi besar dalam tambang, perkebunan, industri, dan infrastruktur sering bersinggungan dengan lahan masyarakat, lingkungan, tenaga kerja, dan hak adat. Bila tata kelola lemah, investasi dapat menimbulkan konflik sosial. Bila tata kelola kuat, investasi dapat menciptakan manfaat bersama.

Kepastian hukum harus dipahami bukan sebagai keberpihakan kepada investor semata, tetapi sebagai kepastian bagi semua pihak: investor, pekerja, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan lingkungan. Pembangunan yang baik tidak boleh mengorbankan masyarakat demi investasi, tetapi juga tidak boleh membuat investasi produktif terhambat oleh ketidakpastian.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat rule of law, penyelesaian sengketa, tata kelola lahan, konsultasi publik, perizinan berbasis risiko, dan evaluasi dampak lingkungan yang kredibel. Investasi berkualitas hanya akan datang bila negara mampu menjamin kepastian sekaligus keadilan.

10. Hilirisasi dan Politik Nilai Tambah

Hilirisasi menjadi strategi penting dalam pembangunan Indonesia. Logikanya jelas: Indonesia tidak ingin selamanya mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia berharap memperoleh nilai tambah, lapangan kerja, teknologi, ekspor, dan penerimaan negara yang lebih besar.

Namun, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi. Hilirisasi adalah politik nilai tambah. Ia menentukan siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang memperoleh izin, siapa yang membangun pabrik, siapa yang bekerja, siapa yang mendapatkan keuntungan, dan siapa yang menanggung dampak lingkungan. Oleh karena itu, hilirisasi memerlukan tata kelola yang sangat kuat.

Hilirisasi dapat menjadi jalan menuju industrialisasi bila memenuhi beberapa syarat. Pertama, ada transfer teknologi. Kedua, ada keterkaitan dengan industri lokal. Ketiga, ada peningkatan keterampilan tenaga kerja. Keempat, ada standar lingkungan yang ketat. Kelima, ada transparansi perizinan dan insentif. Keenam, ada strategi naik kelas dari pengolahan dasar menuju produk akhir dan inovasi.

Tanpa syarat tersebut, hilirisasi dapat berubah menjadi ekstraktivisme baru. Indonesia mungkin tidak lagi mengeksport bijih mentah, tetapi tetap berada di rantai nilai rendah. Nilai tambah tertinggi tetap dinikmati oleh pemilik teknologi, merek, pasar, dan pembiayaan. Risiko lingkungan ditanggung daerah penghasil. Tenaga kerja lokal hanya masuk pada pekerjaan tertentu. Jika demikian, hilirisasi tidak otomatis membawa Indonesia menjadi negara maju.

Hilirisasi harus dikaitkan dengan kebijakan industri nasional. Negara perlu membangun ekosistem riset, vokasi, pemasok lokal, standardisasi, energi bersih, logistik, pembiayaan, dan akses pasar. Hilirisasi juga harus diawasi agar tidak menjadi ruang rente baru.

11. Fiskal Pembangunan: Belanja Besar dan Kualitas Anggaran

Pembangunan membutuhkan anggaran. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, riset, pertahanan, transisi energi, dan penguatan daerah semuanya membutuhkan pembiayaan. Namun, kapasitas fiskal Indonesia terbatas. Rasio pajak masih menjadi tantangan, sementara kebutuhan belanja meningkat. Di sinilah kualitas tata kelola fiskal menjadi krusial.

Belanja negara harus dibedakan antara belanja produktif dan belanja konsumtif. Belanja produktif meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, teknologi, dan energi. Belanja konsumtif dapat menjaga daya beli jangka pendek, tetapi bila terlalu besar dan tidak tepat sasaran dapat membebani APBN.

Kualitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan. Program pendidikan besar belum tentu meningkatkan kualitas belajar bila tata kelola sekolah lemah. Anggaran kesehatan besar belum tentu meningkatkan kesehatan masyarakat bila layanan primer buruk. Infrastruktur mahal belum tentu produktif bila tidak

terhubung dengan pusat ekonomi. Subsidi besar belum tentu adil bila lebih banyak dinikmati kelompok mampu.

Politik anggaran juga menentukan distribusi kekuasaan. Anggaran adalah arena kepentingan antara kementerian, daerah, DPR, BUMN, swasta, dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas anggaran sangat penting. Publik perlu mengetahui untuk apa uang negara digunakan dan apa hasilnya.

Indonesia membutuhkan reformasi fiskal yang tidak hanya mengejar penerimaan lebih besar, tetapi juga belanja lebih berkualitas. Pajak harus adil, administrasi pajak harus modern, belanja harus berbasis kinerja, subsidi harus tepat sasaran, dan proyek harus dievaluasi berdasarkan manfaat nyata.

12. Program Sosial dan Politik Kesejahteraan

Pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan. Negara juga harus melindungi kelompok rentan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan masyarakat luas. Program sosial seperti bantuan tunai, jaminan kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi memiliki peran penting dalam menjaga daya beli, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan modal manusia.

Namun, program sosial juga memerlukan tata kelola kuat. Program sosial yang besar tanpa data akurat dapat salah sasaran. Bantuan dapat jatuh kepada yang tidak berhak, sementara kelompok rentan tidak menerima. Program sosial juga dapat menjadi alat politik elektoral bila tidak dikelola transparan. Dalam demokrasi, kebijakan kesejahteraan harus dibedakan dari patronase politik.

Program sosial yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Pertama, tepat sasaran. Kedua, berbasis data terpadu. Ketiga, mudah diakses. Keempat, transparan. Kelima, dievaluasi. Keenam, terhubung dengan

pemberdayaan. Bantuan sosial perlu menjaga daya beli, tetapi dalam jangka panjang harus membantu masyarakat keluar dari kerentanan.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, program sosial harus dipahami sebagai investasi manusia. Program gizi, pendidikan anak usia dini, kesehatan ibu-anak, pengurangan stunting, dan pelatihan kerja memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas. Namun, bila tata kelola buruk, program baik pun dapat kehilangan efektivitas.

13. Digital Governance dan Negara Berbasis Data

Transformasi digital memberi peluang besar untuk memperbaiki tata kelola pembangunan. Pemerintah digital dapat mempercepat layanan publik, mengurangi tatap muka yang rawan pungutan, memperbaiki data, meningkatkan transparansi, dan memudahkan evaluasi kebijakan. Digitalisasi dapat menjadi alat penting untuk membangun negara yang lebih responsif dan akuntabel.

Namun, digital governance bukan hanya membuat aplikasi. Banyak pemerintah membuat aplikasi, tetapi tidak memperbaiki proses bisnis. Akibatnya, masyarakat menghadapi terlalu banyak aplikasi, data tidak terintegrasi, dan pelayanan tetap rumit. Digitalisasi yang baik harus dimulai dari penyederhanaan proses, integrasi data, interoperabilitas sistem, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi.

Negara berbasis data sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan membutuhkan data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, investasi, lingkungan, dan wilayah. Tanpa data yang baik, kebijakan hanya didasarkan pada asumsi. Data yang buruk menghasilkan kebijakan yang buruk.

Namun, digitalisasi juga membawa risiko. Serangan siber, kebocoran data, penyalahgunaan informasi, diskriminasi algoritmik, dan ketimpangan akses digital dapat merusak kepercayaan publik. Karena itu, digital governance

harus disertai tata kelola keamanan siber, etika data, perlindungan privasi, audit teknologi, dan literasi digital masyarakat.

Di era AI, pemerintah dapat menggunakan analitik data untuk memprediksi kebutuhan layanan, mengidentifikasi risiko korupsi, memantau proyek, dan mempercepat respons krisis. Tetapi AI tidak boleh menggantikan akuntabilitas manusia. Teknologi harus menjadi alat tata kelola, bukan tirai baru untuk menutupi keputusan yang tidak transparan.

14. Demokrasi, Partisipasi Publik, dan Kualitas Kebijakan

Pembangunan berkualitas membutuhkan partisipasi publik. Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, memberi masukan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan. Partisipasi publik memperbaiki kualitas kebijakan karena pemerintah memperoleh informasi langsung dari masyarakat yang terdampak.

Namun, partisipasi publik sering dianggap memperlambat pembangunan. Dalam proyek besar, konsultasi publik kadang dipandang sebagai hambatan. Padahal, mengabaikan partisipasi dapat menghasilkan konflik sosial yang lebih mahal. Proyek yang tidak melibatkan masyarakat dapat menghadapi penolakan, gugatan, konflik lahan, dan kehilangan legitimasi.

Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi kritik. Kritik bukan musuh pembangunan. Kritik adalah mekanisme koreksi. Media, akademisi, masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan warga memiliki peran penting dalam menjaga pembangunan agar tidak menyimpang. Tanpa kritik, negara mudah jatuh pada kesalahan kebijakan yang mahal.

Namun, demokrasi juga perlu menghasilkan kebijakan efektif. Partisipasi tidak boleh menjadi sekadar formalitas. Musyawarah pembangunan, konsultasi publik, dan mekanisme pengaduan harus memiliki dampak nyata pada keputusan. Jika partisipasi hanya simbolik, kepercayaan publik menurun.

Politik pembangunan Indonesia perlu membangun demokrasi deliberatif: keputusan pembangunan tetap efektif, tetapi melalui proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, tata kelola demokratis bukan hambatan pertumbuhan, melainkan syarat pertumbuhan yang sah dan berkelanjutan.

15. Lingkungan Hidup dan Batas Ekologis Pembangunan

Pembangunan Indonesia menghadapi batas ekologis. Pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dapat menghasilkan pendapatan jangka pendek, tetapi juga membawa biaya lingkungan jangka panjang: deforestasi, pencemaran air, kerusakan pesisir, emisi karbon, banjir, kekeringan, dan konflik agraria. Dalam era perubahan iklim, tata kelola lingkungan menjadi bagian penting dari tata kelola pembangunan.

Ambisi pertumbuhan tinggi sering menimbulkan godaan untuk melonggarkan standar lingkungan. Perizinan dipercepat, pengawasan dikurangi, dan dampak ekologis dianggap sebagai biaya yang dapat ditunda. Pendekatan seperti ini berbahaya. Kerusakan lingkungan bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah ekonomi. Bencana ekologis menghancurkan infrastruktur, menurunkan produktivitas pertanian, merusak kesehatan, dan membebani APBN.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi antara ekonomi dan ekologi. Hilirisasi mineral, perkebunan, energi, infrastruktur, dan industri harus dikelola dengan standar lingkungan yang kredibel. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan harus menjadi instrumen substantif, bukan formalitas administratif. Masyarakat lokal harus dilibatkan. Data lingkungan harus terbuka. Penegakan hukum harus konsisten.

Indonesia memiliki peluang besar dalam ekonomi hijau dan biru: energi terbarukan, panas bumi, surya, bioenergi, konservasi hutan, karbon biru, perikanan berkelanjutan, pariwisata alam, dan ekonomi sirkular. Namun, peluang ini hanya dapat diwujudkan bila tata kelola lingkungan kuat.

16. Pembangunan Infrastruktur: Produktivitas atau Proyek Mercusuar?

Infrastruktur merupakan syarat penting pertumbuhan. Jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, internet, irigasi, dan transportasi publik dapat menurunkan biaya logistik, membuka akses pasar, meningkatkan mobilitas, dan memperkuat integrasi nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan infrastruktur yang kuat untuk mengatasi fragmentasi geografis.

Namun, pembangunan infrastruktur juga harus dinilai dari produktivitasnya. Tidak semua proyek besar otomatis bermanfaat. Infrastruktur yang baik harus terhubung dengan kebutuhan ekonomi dan sosial. Jalan harus menghubungkan pusat produksi dengan pasar. Pelabuhan harus mendukung perdagangan. Bandara harus memiliki permintaan yang memadai. Bendungan harus mendukung pertanian dan air bersih. Internet harus digunakan untuk pendidikan, usaha, dan layanan publik.

Risiko proyek mercusuar muncul ketika infrastruktur dibangun untuk simbol politik, bukan kebutuhan nyata. Proyek besar mudah dikomunikasikan kepada publik, tetapi manfaatnya belum tentu sepadan dengan biaya. Jika proyek dibiayai utang tetapi tidak menghasilkan produktivitas, beban fiskal meningkat.

Tata kelola infrastruktur harus mencakup perencanaan berbasis data, analisis biaya-manfaat, transparansi pengadaan, pengawasan konstruksi, evaluasi pascaprojek, dan keterlibatan masyarakat. Infrastruktur harus menjadi alat produktivitas, bukan sekadar simbol kemajuan.

17. Pusat-Daerah, IKN, dan Politik Ruang Pembangunan

Pembangunan Indonesia juga merupakan politik ruang. Di mana investasi ditempatkan, kota mana yang dikembangkan, daerah mana yang menjadi

prioritas, dan bagaimana konektivitas dibangun adalah keputusan politik yang berdampak besar. Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa menjadi salah satu tantangan terbesar.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara mencerminkan upaya mengubah pusat gravitasi pembangunan. Secara gagasan, pemindahan ibu kota dapat dipahami sebagai strategi pemerataan, pengurangan beban Jakarta, dan pembangunan pusat baru di luar Jawa. Namun, keberhasilan IKN sangat bergantung pada tata kelola: pembiayaan, perencanaan, lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, investasi, dan kesinambungan kebijakan.

Politik ruang pembangunan juga mencakup kawasan industri, desa, perbatasan, pesisir, dan wilayah timur Indonesia. Indonesia tidak boleh hanya membangun pusat pertumbuhan yang terpisah dari masyarakat sekitarnya. Kawasan industri harus terhubung dengan UMKM lokal, pendidikan vokasi, perumahan pekerja, transportasi, dan lingkungan.

Desain pembangunan wilayah harus berbasis potensi lokal. Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatra, dan Jawa memiliki karakter ekonomi berbeda. Pembangunan yang seragam tidak akan efektif. Tata kelola pembangunan harus adaptif terhadap konteks daerah.

18. Peran Perguruan Tinggi dan Pengetahuan dalam Tata Kelola

Pembangunan berkualitas membutuhkan pengetahuan. Perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas akademik memiliki peran penting dalam merancang, mengkritik, dan mengevaluasi kebijakan. Dalam negara modern, kebijakan publik harus berbasis bukti, bukan hanya intuisi politik.

Perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam banyak hal: analisis dampak kebijakan, evaluasi program, inovasi teknologi, pelatihan birokrasi, kajian lingkungan, pengembangan UMKM, dan pendidikan masyarakat. Namun, peran akademik hanya efektif bila ada kebebasan berpikir, integritas ilmiah, dan akses data.

Politik pembangunan sering membutuhkan narasi optimistis. Namun, akademisi memiliki tugas menjaga realisme. Jika target pertumbuhan terlalu tinggi tanpa fondasi, akademisi perlu mengingatkan. Jika proyek pembangunan mengabaikan lingkungan, akademisi perlu memberi bukti. Jika program sosial tidak efektif, akademisi perlu mengevaluasi.

Hubungan pemerintah dan perguruan tinggi harus dibangun dalam semangat kolaborasi kritis. Perguruan tinggi bukan sekadar konsultan proyek, tetapi mitra intelektual bangsa. Dalam menuju Indonesia Emas 2045, pengetahuan harus menjadi fondasi tata kelola.

19. Jalan Realistis: Pertumbuhan Berkualitas dengan Tata Kelola Baik

Indonesia tidak perlu memilih antara pertumbuhan dan tata kelola. Keduanya harus berjalan bersama. Pertumbuhan tanpa tata kelola akan rapuh; tata kelola tanpa pertumbuhan akan kehilangan daya dorong kesejahteraan. Jalan realistis adalah membangun pertumbuhan berkualitas melalui tata kelola baik.

Ada beberapa agenda prioritas. Pertama, memperkuat efektivitas pemerintahan. Birokrasi harus lebih profesional, cepat, dan berbasis data. Kedua, meningkatkan kualitas regulasi. Regulasi harus konsisten, sederhana, dan pro-produktivitas. Ketiga, memperkuat rule of law. Kepastian hukum harus berlaku bagi semua pihak. Keempat, mengendalikan korupsi. Pengawasan, transparansi, dan penindakan harus diperkuat. Kelima, memperbaiki kualitas belanja publik. Anggaran harus diarahkan pada program yang terbukti meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Keenam, memperkuat desentralisasi berkualitas. Daerah harus diberdayakan sekaligus diawasi. Ketujuh, membangun sistem data nasional yang terintegrasi. Data adalah fondasi kebijakan modern. Kedelapan, memperkuat partisipasi publik. Kritik, konsultasi, dan pengawasan masyarakat harus menjadi bagian dari pembangunan. Kesembilan,

memastikan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan harus hijau dan adil antargenerasi. Kesepuluh, memperkuat evaluasi kebijakan. Program yang tidak efektif harus dihentikan, bukan dipertahankan karena alasan politik.

Pertumbuhan tinggi harus menjadi hasil dari produktivitas, bukan sekadar mobilisasi anggaran. Investasi harus berkualitas. Hilirisasi harus naik kelas. UMKM harus produktif. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas. Infrastruktur harus terhubung dengan kebutuhan ekonomi. Program sosial harus tepat sasaran. Semua itu hanya mungkin bila tata kelola kuat.

20. Kesimpulan

Politik pembangunan Indonesia berada pada persimpangan antara ambisi pertumbuhan dan kualitas tata kelola. Ambisi pertumbuhan tinggi diperlukan karena Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah, memanfaatkan bonus demografi, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat industri, dan mencapai Indonesia Emas 2045. Namun, ambisi tersebut tidak akan berhasil bila tata kelola lemah.

Pertumbuhan yang dikejar tanpa transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, birokrasi efektif, pengendalian korupsi, partisipasi publik, dan keberlanjutan lingkungan dapat berubah menjadi pertumbuhan rapuh. Ia mungkin meningkatkan PDB dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan biaya sosial, ekologis, fiskal, dan politik dalam jangka panjang.

Sebaliknya, tata kelola yang baik dapat mengubah ambisi pertumbuhan menjadi transformasi nasional. Negara yang efektif mampu merancang kebijakan, mengelola anggaran, mengawasi proyek, melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan menciptakan iklim investasi yang kredibel. Pemerintahan yang bersih membangun kepercayaan. Hukum yang pasti mendorong investasi. Partisipasi publik memperbaiki kualitas keputusan. Data yang baik membuat program tepat sasaran.

Karena itu, agenda pembangunan Indonesia harus bergerak dari paradigma “pertumbuhan terlebih dahulu” menuju “pertumbuhan berkualitas melalui tata kelola baik”. Pertumbuhan tetap penting, tetapi kualitas pertumbuhan lebih penting. Pembangunan bukan hanya tentang seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan itu dihasilkan, siapa yang menikmatinya, apa dampaknya terhadap lingkungan, dan apakah ia memperkuat masa depan bangsa.

Indonesia memiliki modal besar: penduduk, sumber daya alam, pasar domestik, posisi geopolitik, budaya gotong royong, dan visi jangka panjang. Namun, modal itu hanya akan menjadi kekuatan bila dikelola dengan institusi yang baik. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat mengejar pertumbuhan tinggi tanpa kehilangan arah moral pembangunan. Dengan demikian, politik pembangunan Indonesia harus menjadi politik yang tidak hanya mengejar angka, tetapi membangun peradaban: maju, adil, bersih, produktif, hijau, dan bermartabat.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban pejabat publik atau lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil kebijakan kepada publik.

Ambisi Pertumbuhan

Keinginan atau target pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Birokrasi

Aparatur administratif negara yang menjalankan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, perizinan, penganggaran, dan pengawasan.

Desentralisasi

Pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu.

Digital Governance

Tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan sistem elektronik untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Ekonomi Politik

Kajian mengenai hubungan antara ekonomi, kekuasaan, institusi, kebijakan, kepentingan, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat.

Good Governance

Tata kelola yang baik, ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, kepastian hukum, pengendalian korupsi, dan orientasi pelayanan publik.

Hilirisasi

Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Indonesia Emas 2045

Visi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan pada usia 100 tahun kemerdekaan.

Institusi

Aturan formal dan informal yang mengatur perilaku ekonomi, politik, dan sosial, termasuk hukum, norma, organisasi, dan mekanisme pengawasan.

Korupsi

Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau kepentingan tertentu yang merugikan kepentingan umum.

Legitimasi Politik

Tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah dan kebijakan yang dijalankan.

Middle-Income Trap

Kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai pendapatan menengah tetapi gagal naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas dan inovasi tidak meningkat cukup cepat.

Partisipasi Publik

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan Inklusif

Pembangunan yang manfaatnya dirasakan luas oleh berbagai kelompok masyarakat dan wilayah, bukan hanya oleh kelompok tertentu.

Politik Pembangunan

Proses politik yang menentukan arah, prioritas, pelaksanaan, dan distribusi hasil pembangunan.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih bernilai dengan input yang sama atau lebih efisien.

Proyek Mercusuar

Proyek besar yang tampak simbolik atau prestisius tetapi belum tentu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang sepadan dengan biayanya.

Regulatory Quality

Kualitas regulasi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang jelas, konsisten, efisien, dan mendukung aktivitas ekonomi produktif.

Rule of Law

Prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua orang dan lembaga secara adil, konsisten, dan dapat ditegakkan.

Tata Kelola

Sistem, proses, dan praktik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pertanggungjawaban publik.

Transparansi

Keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengawasi proses serta hasil kebijakan.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. doi:10.1257/aer.91.5.1369
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60(2), 323–351. doi:10.2307/2951599
- Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. *European Economic Review*, 40(6), 1203–1228. doi:10.1016/0014-2921(95)00030-5
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen*. BPS-Statistics Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan perekonomian Indonesia dan indikator ekonomi moneter*. Bank Indonesia.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. doi:10.2307/2937943

- Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.
- Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. *Econometrica*, 77(3), 623–685. doi:10.3982/ECTA6248
- Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities*. Palgrave Macmillan.
- Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality: An overview. *World Bank Policy Research Working Paper No. 7034*. doi:10.1596/1813-9450-7034
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: Evidence across countries. *Journal of Public Economics*, 83(3), 325–345. doi:10.1016/S0047-2727(00)00158-4
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. doi:10.1257/aer.89.3.379
- Gupta, K. (2026). Prabowonomics: Can Indonesia really grow at 8%? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. doi:10.1080/00074918.2026.2638632
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. doi:10.1007/s10887-006-9009-4
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *World Bank Policy Research Working Paper No. 5430*. doi:10.1596/1813-9450-5430
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *RPJMN 2025–2029: Fondasi awal wujudkan Visi Indonesia Emas 2045*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Khan, M. H. (2010). Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions. *SOAS Working Paper*.

Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *American Economic Review*, 64(3), 291–303.

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. doi:10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. doi:10.2307/2946696

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. *American Political Science Review*, 87(3), 567–576. doi:10.2307/2938736

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *OECD economic outlook: Indonesia*. OECD.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Persson, T., & Tabellini, G. (2000). *Political economics: Explaining economic policy*. MIT Press.

Reinert, E. S. (2007). *How rich countries got rich... and why poor countries stay poor*. Constable.

Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2008(2), 365–412. doi:10.1353/eca.0.0020

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33. doi:10.1007/s10887-015-9122-3

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. doi:10.1086/261725

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. doi:10.2307/1884513

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025: Indonesia country profile*. Transparency International.

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects: Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank.

World Bank. (2026). *Worldwide Governance Indicators*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia country overview and economic prospects*. World Bank.

Catatan: sumber resmi seperti BPS, Bappenas, BI, OECD, Transparency International, dan World Bank umumnya tidak memiliki DOI karena berupa laporan institusional; DOI saya cantumkan untuk artikel jurnal, working paper, dan karya akademik yang memang memiliki DOI.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 6 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a225a06-3f70-83ec-bc5e-1c93a8a5ed2e)). <https://chatgpt.com/c/6a225a06-3f70-83ec-bc5e-1c93a8a5ed2e>

*Rudy C Tarumingkeng: Politik Pembangunan Indonesia: Antara Ambisi
Pertumbuhan dan Kualitas Tata Kelola*